

## AGAMA DAN KEKERASAN MASSA

Oleh M. Djunaidi Ghony

Penulis adalah Dosen tetap STAIN Malang dan Peserta Program Doktor IAIN Yogyakarta

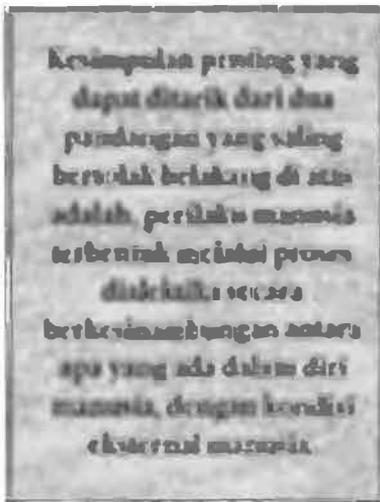
### A. Pendahuluan

Semenjak pertengahan tahun 1996, sampai memasuki tahun 2000 ini, kekerasan massa (*mass violence*) menjadi salah satu warna sosiologis yang sangat mencolok dalam kehidupan masyarakat kita. Beberapa peristiwa yang dapat disebut kembali misalnya peristiwa 27 Juli 1996, yang konon melebihi peristiwa Malari dua dekade yang lalu. Selanjutnya, secara beruntun terjadi beberapa peristiwa yang sejenis seperti yang terjadi di Situbondo, Tasikmalaya, Rengasdengklok, Pontianak dan Maluku

Semua rangkaian peristiwa di atas, mendorong berbagai kalangan mencari penjelasan secara lebih mendasar. Sebagian mencari penjelasan secara sosiologis, karena munculnya peristiwa kekerasan pada dasarnya bermata rantai dengan berbagai macam dimensi sosial yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini tidak berarti, bahwa apa yang ada dalam diri manusia sbagai individu tidak berperan terhadap munculnya kekerasan massa (*mass violence*). Mengikuti pemikiran Thomas Hobbes (1588-1679), dapat diungkap secara nyata daktor manusia yang dapat memicu terjadinya kekerasan massa. Dalam pandangan Hobbes, kekerasan merupakan keadaan alami (*state of nature*) karena dalam diri manusia terdapat dorongan-dorongan irrasional dan anarkistik serta mekanistik yang saling mengiri dan membenci sehingga menjadi kasar, jahat,

buas, pendek pikir (Suseno, 1987:200-7).

Meskipun pandangan Hobbes di atas dapat dibenarkan secara ilmiah, tapi hal itu tidak serta merta dapat memunculkan praktek kekerasan, kalau tidak ada kekuatan impulsif yang datang dari luar individu. Apalagi, di samping kekuatan destruktif tersebut, dalam diri manusia juga terdapat kekuatan konstruktif. Bertolak belakang dengan pandangan Hobbes, Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) mencitrakan manusia sebagai ciptaan yang polos, mencintai diri secara spontan, tidak egois. Hanya rantai peradabanlah yang telah membentuk manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaannya saat ini (Susno, *ibid*). Senada dengan Rousseau adalah pandangan Karl Marx (1818-1883). Marx menolak terhadap pandangan negatif bahwa dalam diri manusia terdapat



potensi yang dapat menggerakkan manusia dapat bertindak destruktif. Dalam pandangan Marx, manusia lebih banyak dibentuk oleh sejarah, khususnya perubahan-perubahan kondisi material manusia (Budiman: 1989:16).

Kesimpulan penting yang dapat ditarik dari dua pandangan yang saling bertolak belakang di atas adalah, perilaku manusia terbentuk melalui proses dialektika secara berkesinambungan antara apa yang ada dalam diri manusia, dengan kondisi eksternal manusia. Dalam wacana keilmuan kedua hal penting itu secara terpisah dicoba dipahami melalui

pendekatan psikologis di satu pihak, agar dapat dipahami secara mendalam kondisi-kondisi internal yang dapat memicu terjadinya sebuah peristiwa yang bersifat sosial. Sedangkan di pihak lain, penghampiran sosiologis digunakan agar dapat dideskripsikan kondisi material (meminjam ungkapan Marx), dengan mana peristiwa dapat terjadi.

Tulisan ini lebih tertarik menggunakan penghampiran secara sosiologis dalam mencari penjelasan terjadinya berbagai kekerasan massa. Selanjutnya nanti akan difokuskan pada agama sebagai salah satu variabel penting yang perlu juga dilihat dalam setiap peristiwa kekerasan terjadi. Meskipun kekerasan bukan semata-mata dipicu oleh agama, tapi seringkali agama dimanfaatkan untuk memberi legitimasi. Anggapan seperti ini segera mengundang diskursus karena merefleksikan kenyataan paradoks dengan misi yang diemban oleh agama. Karena itu dalam konteks ini, agaknya perlu dipertegas tempat sosiologis, sehingga dengan mudah dapat dideskripsikan kaitan agama dengan kekerasan.

Dalam kajian keagamaan, dikenal dua pendekatan, yaitu, pendekatan substantif, dan kedua, pendekatan fungsional (Abdurrahman, 1995:155). Pendekatan pertama dimulai dengan mencoba mempertanyakan apakah agama itu. Sedangkan yang kedua, memulai dengan pertanyaan apakah fungsi sosial dan psikologis agama, baik bagi individu maupun kelompok sosial. Jika dengan pendekatan pertama, dapat dibedakan mana yang agama dan mana yang bukan agama, maka dengan pendekatan kedua, dapat dideskripsikan realitas agama yang memantul dalam struktur, sistem dan pengaturan sosial. Dalam pendekatan kedua ini, tidak lagi dipersoalkan ketentuan imperatif teologi agama bagaimana seharusnya realitas sosial dikonstruksi. Terhadap persoalan kekerasan, tidak perlu diperdebatkan, apakah kekerasan itu merupakan penyimpangan dari

doktrin agama atau tidak. Tapi yang perlu dieksplorasi lebih jauh terjadinya tali-temali antara kekerasan dengan agama.

## B. Kekerasan : Pendefinisian dan Beberapa Hipotesa Teoretik

Di bawah ini akan dipaparkan pengertian kekerasan dan beberapa teori yang bisa saja masih bersifat hipotetik. Khusus tentang teori, tulisan ini lebih banyak merujuk pada pemikiran kalangan pakar sosial di tanah air yang banyak memberikan analisis terhadap masalah kerusuhan sosial. Dengan cara ini, diharapkan tulisan ini lebih bermakna secara empirik.

Kata kekerasan bersepadan dengan kata *violence* dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata *violence* berkaitan erat dengan gabungan kata *vis* (daya, kekuatan) dan *latus* (yang berasal dari *ferre*, membawa) yang kemudian berarti membawa kekuatan (Windhu, 1992:62).

Dalam bahasa kita sehari-hari (Indonesia), umumnya kekerasan dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Pengertian seperti ini agaknya telah menjadi semacam *common sense*. Lihat saja misalnya pengertian dari Robert Audi (dalam Windhu, *ibid*), yang merumuskan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang atau binatang; atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam dan ganas atas milik atau sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik seseorang. Pengertian yang sama dapat kita baca dalam, *The Harper Collins Dictionary Sociology* (Jary & Jary, 1991:545). Dalam buku ini kekerasan (*violence*) diartikan : *the infliction of physical on the human body, or human property, by physical force using the body or weapons*.

Pengertian yang sempit tentang kekerasan di atas ditolak oleh Johan Galtung, tokoh garda depan teori ketergantungan. Galtung dalam memzhami kekerasan dilihat pada segi akibat atau pengaruhnya pada manusia. Karena dari

sudut korban ini, kekerasan dalam pandangan Galtung tidak banyak bedanya apakah mati kelaparan merupakan akibat serangan militer yang berlarut-larut atau akibat ketidakadilan, ketidakmerataan, dan atau struktur vertikal dan simetris. Juga tidak ada bedanya seseorang dibunuh secara cepat dengan peluru atau mati pelan-pelan karena kekurangan makan (Windhu, *op. Cit.*:65). Mengikuti pandangan Galtung ini, dengan demikian kekerasan mengandung cakupan yang luas, tidak hanya berupa kekerasan yang bersifat fisik, tapi juga psikologis, struktural dan kultural. Sejalan dengan ini, kita sering mendengar perbincangan tentang kekerasan budaya dan kekerasaan struktural. Kalau kemudian kekerasaan lebih banyak dilihat pada aspek fisik atau material, bisa jadi karena akibat dari kekerasan itu lebih banyak bersifat fisik atau material.

Lalu kenapa peristiwa kekerasan selalu muncul? Faktor-faktor apa saja yang menggerakkannya? Kenapa masyarakat kita, yang terkenal dengan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat religius yang tinggi, tiba-tiba menjadi beringas? Kenapa nilai-nilai budaya dan keagamaan kehilangan fungsi integrasinya? Di bawah ini akan dicoba dikonstruksi kembali beberapa teori yang kiranya dapat menjelaskan peristiwa kekerasan tersebut. Secara umum, jika ditarik benang merah, teori yang dipakai oleh beberapa pakar sosial berderivasi dari teori perubahan sosial. Dalam kerangka ini, kekerasan dipahami sebagai akibat lebih lanjut dari terjadinya perubahan sosial yang seringkali mendatangkan efek negatif bagi kalangan tertentu.

Pertama kita mulai dari pemikiran Kuntowijoyo. Dalam tulisannya, Perubahan

Sosial dalam PJP I (1970-1995) : Kerangka Analisis Sosial dan Historis (*Suara Muhammadiyah*, No. 4 Tahun ke-82), Kuntowijoyo memberikan suatu analisis yang sangat menarik tentang terjadinya perubahan sosial serta berbagai dampak sosial yang ditimbulkannya sepanjang pembangunan jangka panjang tahap pertama. Menurutnya, terdapat tiga kekuatan pengubah yang ekerja sepanjang PJP I, yaitu industrialisasi (diterapkannya organisasi, manajemen dan teknologi dalam produksi dan jasa); urbanisme (pertumbuhan menuju bentuk kota, perpindahan penduduk dari desa ke kota, dan dipakainya gaya hidup kota oleh orang desa); dan internasionalisasi (hadirnya usaha-usaha internasional seperti LSM, *Lion Club*, Darul Arqam dan lain sebagainya).

Di antara tiga kekuatan di atas—meskipun saling melengkapi Kuntowijoyo memberikan tekanan pada industrialisasi yang dapat menimbulkan efek negatif berupa terjadinya kekerasan.

Dasar analisisnya adalah bahwa selama PJP I desa-desa telah berubah dari desa sosial ke desa ekonomi, ikatan-ikatan sosial melonggar. Pekerjaan *off-farm* menjadi bagian desa yang semakin penting. Makin dekat dengan kota perubahan sosial itu semakin terasa. Industri-industri besar juga dibangun di kota dan dilokasi tersendiri yang ternyata menyebabkan dislokasi sosial. Mereka yang bekerja pada industri itu makin lama makin kehilangan basis agraris mereka menjadi proletariat tulen. Proletariat kota dan para pekerja non pertanian itulah, menurut Kuntowijoyo, yang apabila ada persoalan (pengangguran, penghinaan) mudah sekali menjadi emosional, punya *collective behavior*, tidak harus digerakkan oleh pihak ketiga atau

**Mengikuti pandangan Galtung ini, dengan demikian kekerasan mengandung cakupan yang luas, tidak hanya berupa kekerasan yang bersifat fisik, tapi juga psikologis, struktural dan kultural.**

dikipasi.

Pemikiran Kuntowijoyo di atas dinilai oleh banyak kalangan lebih murni dibandingkan dengan analisis lain yang menggunakan teori konspirasi yang serba hitam putih dan simplikatif dalam melihat permasalahan. Teori ini sempat dimunculkan ketika terjadi kerusuhan di Situbondo dan Tasikmalaya, yang mengatakan kasus-kasus itu sebagai usaha mendeskreditkan sebuah organisasi keagamaan tertentu. Padahal, mengutip kembali pemikiran Kuntowijoyo, peristiwa yang terjadi di Situbondo dan Tasikmalaya serta peristiwa yang mendahuluinya, peristiwa 27 Juli 1996 di Jakarta, karena banyaknya pekerja non-pertanian yang menjadi anarkis karena mereka tidak akan kehilangan apa-apa bila terjadi perubahan.

Masih dalam kerangka teori perubahan sosial, analisis berikutnya yang relevan dikonstruksi kembali adalah pemikiran Sunyoto Usman. Dalam tulisannya tentang, Agama dan Kekerasan Orang Kota (*Suara Muhammadiyah*, No. 4 Tahun ke-82), Sunyoto Usman berpendapat bahwa munculnya kekerasan dalam masyarakat karena lebih berpengaruhnya faktor *non-adaptive* daripada faktor *adaptive* pada saat masyarakat sedang dilanda krisis nilai dan norma sosial. Nilai-nilai sosial yang telah lama disosialisasikan tidak lagi dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan interaksi sosial. Demikian pula norma-norma sosial yang tidak mampu mengendalikan arn perilaku anggota masyarakat. Ketika itu, menurut sunyoto Usman, ada kekecewaan yang amat hebat karena berbagai harapan masyarakat baik yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, politik maupun kultural tak dapat

**Di antara tiga kekuatan di atas—meskipun saling melengkapi Kuntowijoyo memberikan tekanan pada industrialisasi yang dapat menimbulkan eksese negatif berupa terjadinya kekerasan. Dasar analisisnya adalah bahwa selama PJP I desa-desa telah berubah dari desa sosial ke desa ekonomi, ikatan-ikatan sosial melonggar.**

terpenuhi. Garis ekspektasi telah berkembang sedemikian rupa meninggalkan garis apa yang dipakai. Garis ekspektasi memang hampir tidak pernah bersinggungan dengan garis apa yang dicapai, tetapi ketika jarak antara dua garis tersebut masih dalam ambang batas toleransi maka biasa tidak menimbulkan masalah. Masalah (terutama kekerasan) akan muncul ke permukaan ketika jarak antara dua garis tersebut sudah melewati ambang batas.

Pandangan Sunyoto Usman di atas berkoherensi dengan teori deprivasi relatif (*relative deprivation*) yang dikembangkan oleh Ted Robert Gurr (Saleh, 1996:16-20). Teori ini digunakan untuk menjelaskan terjadinya frustrasi sosial dalam masyarakat yang disebabkan oleh perubahan sosial yang demikian cepat. Perubahan sosial menurut Gurr dapat mengakibatkan terjadinya deprivasi relatif, yaitu perasaan tidak sesuai antara ekspektasi nilai dengan kapabilitas nilai pada individu atau kelompok masyarakat.

Ekspektasi nilai di sini diartikan sebagai kondisi atau hal-hal yang mampu diraih dan dipertahankan.

### C. Agama, Integritas Sosial dan Kekerasan : Perspektif Struktur-Fungsional dan Konflik

Dalam beberapa kasus kekerasan di tanah air, selalu ada kecenderungan baik disengaja atau tidak agama dilibatkan di dalamnya. Dari sini kemudian dimunculkan wacana konflik, kerusuhan dan kekerasan agama. Meskipun secara teologis keadaan ini dipandang sebagai bentuk paradoks, dalam realitas empirik atau ketika agama telah mewujudkan menjadi realitas sosial, kecenderungan ke arah itu sangat

dimungkinkan terjadi sehingga agama kehilangan fungsi integrasi sosialnya.

Jika dipandang dari pespektif teori struktur fungsional, masyarakat pada dasarnya merupakan suatu *equilibrium* sosial dari semua institusi yang ada di dalamnya. Sebagai keseluruhan sistem sosial masyarakat menciptakan pola-pola kelakuan yang terdiri atas norma-norma yang dianggap sah dan mengikat oleh anggotanya yang menjadi pengambil bagian dari sistem itu. Keseluruhan dari institusi-institusi yang membentuk sistem sosial itu sedemikian rupa, sehingga setiap bagian saling mengutungkan dengan semua bagian lainnya sedemikian erat hingga perubahan dalam satu bagian mempengaruhi bagian yang lain dan keadaan sistem sebagai keseluruhan (Hendropuspito, 1990:27). Agar masyarakat sebagai suatu sistem tetap *survive* dan tidak mengalami kekacauan di dalamnya, menurut Talcott Parsons (Ritzer, 1983:87), setiap lembaga yang ada dalam masyarakat perlu menjalankan fungsi pokok (*functional imperative*) apa yang kemudian disebut AGIL (*Adaption, Goal Attainment, Integration, Latency*).

Bagaimana agama memfungsikan dalam sistem sosial tersebut? Dalam perspektif struktur fungsional, agama dipandang mempunyai peran dalam menciptakan ikatan bersama baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka (Nottingham, 1990:42). Fungsi seperti itu secara empirik telah dibuktikan oleh Emile Durkheim yang mengantarkan pada suatu kesimpulan bahwa agama berfungsi sebagai kekuatan

pemersatu masyarakat (Horton & Hunt, 1993:306) Dalam, *The Elementary Form of Religious Life* (1912), Durkheim menjelaskan bahwa tujuan agama adalah membantu orang berkomunikasi dengan sesamanya. Ritual-ritual religius yang dijalankan oleh setiap pemeluk agama membantu seseorang untuk mengembangkan rasa paguyuban (*sense of community*) seperti kebersamaan dalam peristiwa perkawinan, kematian dan lain sebagainya.

Durkheim mendasarkan analisisnya kepada laporan ahli-ahli antropologi yang meneliti orang-orang Aborigin Australia sampai ia menemukan arti yang mendasar dari agama dalam masyarakat dimana masyarakat merasa perlu adanya pemupukan keakraban secara teratur yang melahirkan perasaan kolektif, membentuk kesatuan dalam kepribadian dan menghindari adanya kekerasan. Dari sini Durkheim melihat suatu fungsi yang mendasar dari agama yaitu sebagai perekat untuk menguatkan kelompok-kelompok sosial yang ada

dalam masyarakat dimana simbol-simbol agama akan tercermin dalam kehidupan mereka. Durkheim berpendapat bahwa individu manusia sebagai produk masyarakat membutuhkan norma-norma moral dalam kehidupannya serta kemampuan konseptual supaya menjadi manusia yang bermakna sebagaimana yang dikehendaki oleh agama.

Tapi kenapa dalam realitas sosial seringkali agama tidak fungsional seperti yang terlihat pada berbagai tindak kekerasan? Dalam pandangan Durkheim (Burhanuddin, *Kompas*, Senin, 14 April 1997) keadaan ini bersumber dari kondisi masyarakat yang kesadaran kolektifnya yang diantaranya dibentuk oleh agama semakin mele-

**Bagaimana agama memfungsikan dalam sistem sosial tersebut? Dalam perspektif struktur fungsional, agama dipandang mempunyai peran dalam menciptakan ikatan bersama baik diantara anggota-anggota beberapa masyarakat maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial yang membantu mempersatukan mereka (Nottingham, 1990:42).**

mah, di mana bidang-bidang kehidupan yang dikuasai oleh kesadaran kolektif semakin menyempit. Dan melemahnya kesadaran kolektif ini menurut Durkheim merupakan akibat dari pluralisme dan pembagian kerja yang semakin tajam. Tekanan dan paksaan masyarakat terhadap individu semakin berkurang. Dengan demikian terdapat lebih banyak ruang gerak bagi perbedaan-perbedaan individu dan individualisme muncul menjadi semakin kental.

Akibatnya, individu-individu kehilangan pegangan dan terbongkar dari akarnya. Situasi semacam ini kemudian memperlemah ikatan sosial yang mempersatukan individu-individu dengan kelompok-kelompok sosial lainnya. Secara sosial hidup ini menjadi kurang berarti. Akibatnya perkembangan solidaritas sosial, yang merupakan pilar utama bagi kehidupan sebuah masyarakat, terancam. Keadaan seperti berpotensi memunculkan kekerasan yang bersifat sosial.

Di sisi lain, hilangnya kesadaran kolektif dan timbulnya kekerasan, pada dasarnya merupakan keadaan sosiologis yang tidak dapat dipungkiri karena dalam masyarakat, sebagaimana dalam pandangan teori konflik, selalu ditandai dengan persaingan yang mengarah pada terjadinya pertentangan atau konflik. Dijelaskan oleh Sanderson (1993:12) bahwa : (i) kehidupan sosial pada dasarnya merupakan arena konflik atau pertentangan di antara dan di dalam kelompok-kelompok yang bertentangan; (ii) sumber-sumber daya ekonomi dan kekuasaan-kekuasaan politik merupakan hal penting yang berbagai kelompok berusaha merebutnya; (iii) akibat tipikal dari pertentangan ini adalah pembagian masyarakat menjadi kelompok yang determinan secara ekonomi dan kelompok yang ter subordinasi; (iv) pola-pola sosial dasar suatu masyarakat sangat ditentukan oleh pengaruh sosial dari kelompok yang secara ekonomi merupakan kelompok determinan; (v)

konflik dan pertentangan sosial di dalam dan di antara berbagai masyarakat melahirkan kekuatan-kekuatan yang menggerakkan perubahan sosial; (vi) karena konflik dan pertentangan merupakan ciri dasar kehidupan sosial, maka perubahan sosial menjadi hal yang umum dan sering terjadi.

Jika mengikuti gambaran Sanderson di atas, maka konflik dalam kehidupan sosial masyarakat nampak sebagai bentuk kekacauan. Karena itu oleh beberapa ilmuwan sosial konflik dianggap sebagai suatu yang destruktif atau patologis bagi kelompok sosial. Akan tetapi Coser, justru memandang dari sisi lain. Dalam pandangannya, konflik memberikan sumbangan positif untuk membentuk serta mempertahankan struktur. Konflik dapat menciptakan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Dan terakhir, konflik dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tetap tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya (Poloma, 1987:108).

Bagaimana agama dapat menjadi faktor konfliktual yang berakibat pada munculnya kekerasan dalam masyarakat? Munculnya konflik dan kekerasan di mana agama seringkali dilibatkan di dalamnya, sebenarnya lebih merupakan sebagai akibat logis setelah agama mengalami proses pelebagaan secara sistematik dan sistemik. Dalam pelebagaan ini yang terjadi kemudian agama menjadi suatu kesadaran kelompok atau primordial yang bercampur dengan pembentuk kesadaran kelompok atau primordial lainnya seperti etnik, suku, kebangsaan, organisasi dan lain sebagainya. Jadi dengan demikian, agama di sini hanya dijadikan sebagai alat untuk kepentingan kelompok yang terlibat kekerasan.

#### **D. Penutup**

Dari uraian di atas dapatlah dipahami bahwa kendatipun agama memiliki seperangkat

tata nilai dan moral yang dapat dijadikan pandangan hidup bagi masyarakat manusia, tetapi di pihak lain agama juga kadang-kadang dapat menjadi pemicu konflik yang pada urutannya dapat menimbulkan kekerasan atau pun perselisihan yang meluas. Meskipun dalam batas tertentu, perselisihan itu sendiri mempunyai nilai positif dan negatif. Teori konflik dalam sosiologi keagamaan cenderung mementingkan peran *self-interest* dalam perilaku manusia termasuk perilaku yang bersifat religius. Karena itu, dengan optimalisasi peran agama, kekerasan dan konflik dalam masyarakat dengan sendirinya dapat tereliminir atau diperkecil bahkan ditiadakan.

Kuntowijoyo, *Suaran Muhammadiyah*, No. 4 Tahun ke-82.

L. Broom & Philip Selznick, Dorothy Darroch, *Sociology*, Harper & Row Publisher, New York 1981.

Margarett Paloma, *Contempopary Sociologycal Theory*, terj, Tim Yasogama, Rajawali, Jakarta, 1988.

Reace McGee, *Sociology, An Introduction*, Holt, Rinehart and Winstons, New York 1980.

Stephen K. Sanderson, *Macrosociology*, terj, Farid Wajdi, Jakarta, 1993.

Sunyoto Usman, *Suaea Muhammadiyah*, No. 4 tahun ke-82

## DAFTAR PUSTAKA

- Djamari, *Agama Dalam Prespektif Sosiologi*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, Jakarta 1988.
- D. Hendropuspito, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Elizabeth K. Nottingham, *Religion and Society*, terj. Abdul Muis Naharong, Rajawali, Jakarta, 1990.
- Franz-Magnis Suseno, *Etika Politik*, Gramedia, Jakarta, 1987.
- George Ritzer, *Sociology : A Multiple Paradigm*, terj. Alimandan, Rajawali, Jakarta, 1985.
- I Marsana Windhu, *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.
- Karl Marx, *The Eçonomic and Philosophic Manuscripts of 1844*, Internastional Publisher, New York 1964.
- Keith A. Robert, *Religion in Sociologycal Perspective*, The Dorsey Press Homewood, Illionis, 1984.